

TAJUK RENCANA

Pencegahan ’Stunting’

UPAYA pencegahan *stunting* atau gizi buruk pada anak-anak, khususnya bayi berusia dua tahun sampai lima tahun, terus digencarkan oleh pemerintah. Bahkan tidak hanya BKKBN yang gencar memberantas stunting, tetapi Kementerian Agama juga memberikan perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk mendukung program BKKBN, dilakukan melalui program pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk tiga bulan terakhir pranikah. Upaya ini dimaksud sebagai pencegahan stunting yang dimulai dari hulu, yakni kepada calon pengantin.

Program tersebut diluncurkan di Pendapa Parasamya Pemkab Bantul dan diikuti secara nasional oleh 34 Kanwil Kemenag di seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (11/3). Peluncuran dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih. Peluncuran juga ditandai Deklarasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (PTP-PS) Kabupaten Bantul oleh Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo, yang merupakan Deklarasi PTPPS pertama di Indonesia.

Diungkapkan oleh Yaqut Cholil Qoumas, Kemenag dan BKKBN serius dalam upaya menurunkan angka stunting. Sebab menurutnya, pencegahan stunting bagi calon pengantin bukan hanya program atau perintah negara tetapi juga perintah agama.

Bahwa menyiapkan generasi terbaik merupakan risalah ukhuwah agama. Karena itu, upaya penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab Kemenag dan BKKBN, tetapi tanggung jawab bersama.

Menurut Hasto Wardoyo, angka kelahiran stunting di Indonesia masih mencapai 24,4 persen, karena ibu yang saat hamil hingga melahirkan 36 persen anemia. Sementara di Bantul angka stunting sudah di bawah 16 persen, sehingga Bantul layak menjadi percontohan.

Bupati Bantul juga mengungkapkan, pencegahan stunting merupakan visi dan misi Pemkab Bantul. Melalui program berbasis ma-

sarakat padukuhan, Pemkab Bantul menyalurkan dana Rp 50 juta untuk setiap padukuhan, fokus dalam empat sektor, salah satunya kesehatan melalui peningkatan mutu dan kualitas Posyandu yang bertujuan meningkatkan derajat ibu, anak dan ibu hamil.

Beberapa kabupaten/kota saat ini juga mengencarkan penurunan angka stunting. Pemkab Kabupaten Temanggung, misalnya, terus berjuang menurunkan angka stunting. Usaha itu itupun telah berhasil menurunkan sekitar 10 persen, dari 30 persen menjadi 20 persen. Untuk menurunkan angka stunting memang diperlukan keterlibatan semua pihak, dengan fokus mencegah stunting hingga penanganan anak stunting.

Khusus untuk penanganan stunting, Pemkab Temanggung juga membentuk tim pendamping keluarga (TPK), yang terdiri dari bidan desa atau bidan pembina desa, kader PKK, dan kader KB. Bahkan saat di Kabupaten Temanggung terdapat 609 TPK sehingga total anggota TPK ada 1.827 orang, tersebar di 289 desa/kelurahan.

Berbagai upaya memang sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani anak-anak stunting. Karena itu, sangat layak kalau semua Pemkab atau Pemkot dan Pemprov benar-benar memberikan perhatian serius terhadap masalah anak-anak stunting. Tentunya tidak ada pimpinan di negeri ini yang melakukan pembiaran terhadap masalah stunting. Untuk itu, juga sangat diperlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Dengan adanya penanganan yang sungguh-sungguh, anak stunting akan mendapat penanganan khusus, di antaranya pemberian bantuan gizi tambahan, penanganan medis, pengetahuan pola asuh anak, dan bantuan peningkatan kesejahteraan.

Semua itu melibatkan berbagai instansi dan lembaga dan ditangani secara bersama-sama, secara gotong royong. Selain itu, perlu pula pendampingan dan edukasi kepada kelompok sasaran, mulai calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, sampai ibu yang punya bayi berusia dua tahun. □

Mengajarkan Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949

KEPUTUSAN Presiden (Keppres) No 2 Tahun 1922 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara mengundung perdebatan publik. Sebagian reaksi penolakan adalah tidak dimasukkannya nama Soeharto sebagai tokoh penting Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Nama-nama yang disebut dalam pertimbangan naskah tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kemudian juga disebutkan dukungan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakrat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.

Dalam ingatan kolektif masyarakat SU 1 Maret 1949 identik dengan peran besar Soeharto. Selama Orde Baru buku-buku pelajaran sejarah maupun film-film perjuangan, seperti film Janur Kuning, selalu menonjolkan kepahlawanan Soeharto. Pemerintah menanggapi kritik dengan menegaskan Keppres No 2 telah sesuai fakta sejarah. Ketua Tim Naskah Akademis Dr Sri Margana juga tidak mengubris berbagai kritik atas naskah yang disusun timnya. Tulisan ini tidak memperpanjang polemik, tetapi mengajak pembaca melihat dalam perspektif pembelajaran sejarah.

Sebagian masyarakat khawatir Keppres No 2 sebagai produk hukum bermuatan politis, yang berusaha mengubah peran Soeharto dalam SU 1 Maret 1949. Ada kekhawatiran para siswa tidak memperoleh informasi yang utuh lagi atas sejarah peristiwa tersebut. Kekhawatiran itu tidak beralasan bila masyarakat memaknai sejarah secara utuh, dan dapat membedakan bahasa Keppres dengan kisah sejarah.

Guru Sejarah, sosok yang berinteraksi langsung dengan siswa memiliki peran penting dalam menghadirkan sejarah secara utuh atas peristiwa SU 1 Maret 1949. Guru harus memiliki wawasan kesejarahan luas (berkompetensi profesional). Ketika guru mengajarkan peristiwa SU 1 Maret 1949 tentu tak lepas dari peristiwa-peristiwa Agresi Militer Belanda II, PDRI, Perang Gerilya, SU 1 Maret 1949, dan Pengakuan

Supardi

Kedaulatan Indonesia, yang mana pasti peran Soeharto akan disebut. Seperti halnya mengajarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak akan lepas dari peristiwa-peristiwa BPUPKI, PPKI, Kekalahan Jepang, Peristiwa Rengasdengklok, dan proses Proklamasi Kemerdekaan, termasuk para tokoh di dalamnya.

Guru sejarah perlu membelajarkan sejarah dengan menyajikan fakta-fakta penting melalui pengalaman belajar atau metode pembelajaran bervariasi dalam pembelaa-



Ilustrasi : Arko

jaran sejarah kritis. Guru tak perlu menghardikan seluruh fakta tersebut dalam penyampaian informasi secara ekspositori yang membebani siswa dengan tumpukan fakta dan peristiwa. Pembelajaran sejarah kritis mengajak siswa membiasakan berpikir historis berlandaskan metode sejarah kritis.

Dalam mengembangkan pembelajaran sejarah kritis, guru menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti saintifik, discoveri, dan inkuiri. Model-model pembelajaran ini menjadikan siswa sebagai subjek belajar untuk menggali informasi dan makna peristiwa sejarah secara utuh. Pembelajaran *student center* perlu didukung sumber belajar yang bervariasi dan berbasis teknologi kekinian. Berbagai sumber belajar sejarah menyaj-

ikan informasi yang lengkap yang dapat diperoleh melalui pengalaman belajar siswa. Pembelajaran sejarah kritis mengajak siswa berlatih berpikir historis, bukan hanya menerima informasi fakta sejarah. Siswa dapat menemukan fakta dan konsep lebih banyak, bahkan tokoh-tokoh lokal dan bukan orang penting. Mereka dapat menyusun karya sejarah yang membuat pembelajaran sejarah menantang dan bermakna. Keppres dan naskah akademik hanyalah sebagian sumber sejarah di antara sumber-sumber sejarah lainnya.

Hal terpenting terkait tujuan Keppres No 2 adalah menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, seperti pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Kalimat dalam dalam Keppres tersebut mengingatkan fungsi sejarah sebagai alat pendidikan seperti diungkap Kuntowijoyo (1992). Karena itu pembelajaran sejarah tidak hanya mendorong siswa menemukan kisah sejarah, tetapi yang lebih penting menemukan makna di balik kisah sejarah tersebut. SU 1 Maret 1949 memiliki arti penting bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara. Melalui pengalaman belajar tersebut siswa menemukan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kepahlawanan yang dicontohkan para pejuang bangsa. (*)

**) Dr Supardi MPd,
Dosen FIS UNY dan Sekretaris
Masyarakat Sejarawan Indonesia-DIY.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr-@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Jalan Liku TPP Guru

Joko Triyanto

dari Bobot Pegawai terendah; huruf (b) PNS Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah; dan huruf (c) Calon PNS/PNS Guru yang sudah menerima tunjangan profesi ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah.

Tidak dijelaskan mengapa guru diperbandingkan dengan bobot pegawai terendah (pendidikan SD golongan Ia). Padahal Permenpan-RB No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pasal 30 menyebutkan syarat minimal kualifikasi guru adalah S1/ Diploma IV.

Pergub No. 9/2021 hanya berlaku satu tahun dan dicabut dan diberlakukan Pergub No. 112/2021 yang akan berlaku efektif Januari 2022. Pasal terkait TPP ada pada pasal 4, yaitu TPP dikecualikan dan tidak diberikan penuh kepada: huruf (e) Pegawai ASN jabatan Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan pasal ini tergolong "pasal karet" karena tidak menyebutkan besaran TPP yang pasti, sebesar 50% dari apa? Dari bobot 1 atukah dari bobot kelas jabatan?

Namun lembar SPJ trial bulan Januari 2022 mengindikasikan besaran 50% tersebut dari bobot 1 (pegawai terendah) dengan besaran nominal sekitar Rp 450.000,-

BELAKANGAN ini ramai diperbincangkan masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS pada lingkup Pemda DIY. Sebab ada kesenjangan penerimaan TPP jabatan fungsional guru dengan jabatan struktural tata usaha sekolah.

Untuk menyikapi kesenjangan penerimaan TPP tersebut perlu diurutur aturan terkait TPP bagi guru. Awalnya TPP bagi guru (dan pengawas sekolah) terdapat dalam pasal 5 Pergub No. 90/2019 tentang TPP yang menyebutkan ketentuan mengenai pemberian TPP bagi PNS/Calon PNS pada Jabatan Fungsional Guru dan PNS pada Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah diatur dalam Peraturan Gubernur. Tentunya ini menjadikan angin segar bagi guru (dan pengawas sekolah) meski harus menanti Pergub baru yang diamanatkan oleh pasal 5 tersebut.

Pucuk dicinta ulam tiba. Pergub No. 8/2020 Tentang TPP bagi guru dan pengawas sekolah terbentuk sebagai amanat dari pasal 5 Pergub Nomor 90/2019. Pasal terkait tunjangan TPP guru ada pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan pemberian TPP dilakukan sesuai ketentuan dalam Pergub tentang TPP ASN, kecuali pada ketentuan mengenai Bobot Pegawai.

Kemudian ayat (2) menyebutkan Bobot Pegawai ditetapkan sebagai berikut: Guru/-Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi (bobot 1); Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri (bobot 1).

Pergub No. 8/2020 dicabut karena berlakunya Pergub No. 9/2021. Pasal terkait TPP guru dalam Pergub No. 9/2021 adalah Pasal 7 ayat (4) di mana penetapan bobot pegawai dikecualikan dari ketentuan untuk: huruf (a) Calon PNS/PNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen)

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Tiang Listrik yang Mengganggu Pemandangan

YOYAKARTA sebagai kota tujuan wisata, banyak dikunjungi wisatawan. Apalagi saat ini, destinasi wisata yang masa pandemi ditutup, kini sudah diperbolehkan lagi dikunjungi. Tentu akan kehidupan ekonomi wisata, setelah beberapa tahun sesak nafas.

Namun, di sejumlah titik jalan yang dilewati wisatawan, terdapat beberapa tiang listrik dan tiang telepon yang mengganggu keindahan Yogyakarta. Salah satu yang terlihat mencolok, adalah di wilayah Gondomanan.

Tepatnya di depan pojok beteng

utara timur, ada tiang listrik dan 4 tiang telepon yang berdiri berjajar di bahu jalan. Sehingga selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, juga mengurangi keindahan kota. Juga menutupi keanggunan bangunan yang punya cerita sejarah Pojok Beteng Yogyakarta.

Mudah-mudahan usulan demi keindahan Kota Yogya dan kenyamanan lalu lintas, bisa bermanfaat.

**) Aiptu Eka Yulianto,
SH,Tokolan, Tirtonirmolo,
Kretek Bantul.*

Jalan Evakuasi Pengungsi Merapi

GUNUNG Merapi sedang 'punya kerja' batu-batuk, sehingga di sejumlah wilayah ada warga yang mengungsi mandiri. Saya sebagai warga yang sering melewati area jalan evakuasi pengungsi, melihat jalan-jalan di area tersebut masih

ada yang kurang baik karena sering dilewati kendaraan bermuatan berat. Mudah-mudahan adanya peristiwa Merapi, segera diperbaiki, biar memuluskan jalur evakuasi.

**) Sudarmono, Turi, Sleman.*

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afianti, MIN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIU PP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas** : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang** : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo** : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul** : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.